



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 sebagai dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025.

Pasal 1

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 selanjutnya disebut Renja Satuan Polisi Pamong Praja, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

2. Rencana

2. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025.
3. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Bab V Penutup;

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024


PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE
EFREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 97

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 97 TAHUN 2024
TANGGAL 2 Desember 2024

Halaman

SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
Lampiran:	Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Program Kegiatan Serta Pendanaan 7

Tabel 2.2 Rekapitan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (TC.29) ... 9

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP (TC.30) 18

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 (TC.31) ... 25

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan (TC.32) 33

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran OPD 35

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan 36

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2025 merupakan Renja tahun ke pertama yang mengacu pada RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2025 dijadikan rujukan sinergi dan konsiten dengan prioritas dan fokus pembangunan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, harus melekat pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Rujukan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan guna mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang telah dilaksanakan adalah menyusun bagan alur tahapan penyusunan renja, persiapan penyusunan renja, penyusunan rancangan renja, pelaksanaan forum OPD, dan penetapan Renja.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Ende Nomor ~~97~~ Tahun 2024 Tanggal ~~2 Desember~~ 2024 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2025;
2. Surat Keputusan Bupati Ende Nomor ~~496~~/KEP/HK/2024 tanggal ~~28 November~~ 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2025);
3. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
4. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan, dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pemabngunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Perubahan Jangka Menengah Derah dan Rencana Kerje Pemerinta Derah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2022;

11. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
12. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
13. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2023 Tanggal 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende ini adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada Tahun 2025.
- b. Tujuannya adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mengatasi berbagai permasalahan penegakan Perda di Kabupaten Ende.
 2. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
 3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program proritas untuk menjawab IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Tujuan dan sasaran Renja PD dan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB.IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan Kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Perda nomor 11 tahun 2016 yang sebelumnya merupakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Ende.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 menetapkan beberapa Indikator kinerja urusan Ketenteraman serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Target kinerja dimaksud menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Ende. Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dituangkan dalam Renstra Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani
2. Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakan
3. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Penengakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.

Untuk mencapai indikator dan sasaran di atas serta sesuai dengan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Ende pada tahun 2023 melaksanakan 3 Program dan 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan pagu dana Rp. 5.984.776.819,- dengan pencapaian

realisasi sebesar Rp . 5.657.136.963,- (94,53%). Rincian program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

No	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.422.814.319 29.003.000 5.140.328.919 78.351.000 42.231.400 132.900.000	5.132.126.168 29.002.800 4.882.970.646 76.928.420 18.758.302 124.466.000	94,63 99,99 94,99 98,18 44,41 93,65
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan : 1.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	421.442.500 347.942.500 73.500.000	384.660.795 312.460.795 72.200.000	91,27 89,80 98,23
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.520.000 140.520.000	140.350.000 140.350.000	99,88 99,88

Penjelasan sesuai tabel di atas : Program / kegiatan yang memenuhi target / tidak memenuhi target.

Berdasarkan Paparan Program dan kegiatan dalam Tabel 2.1. di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Program dan kegiatan yang belum mencapai 100 persen yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,65%, Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 91,27%, sedangkan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran memenuhi target 100%.

Secara detail pencapaian kinerja program dan kegiatan dari hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Renstra sampai dengan dengan tahun 2023 (pelaksanaan Renja tahun berjalan Tahun 2023) dapat dilihat pada **Tabel 2.2 TC.29** berikut :

TABEL 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende
Kabupaten : Ende

KODE PROGRAM/ KEGIATAN						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM dan KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM dan KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 = 5*7*9	11= 10/4
7	1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	20%
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 dokumen	2 Dokumen
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersedia	10 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan yang tersedia	30 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	24 dokumen	6 dokumen
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan yang tersedia	30 dokumen	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	24 dokumen	6 dokumen
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	80%	100%	94,99%	94,99%	100%	80,00%	20%
7	01	01	2	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Gaji dan Tunjangan ASN	370	80%	210 orang	210 orang	100%	210 orang	210 orang	210 orang
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
7	01	01	2	02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Seluruh Bahan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	250 Laporan	200 dokumen	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	200 dokumen	50 Laporan
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Regulasi yang Berlaku	250 Laporan	200 dokumen	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	200 dokumen	50 Laporan

7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun n)	250 Laporan	200 dokumen	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	200 dokumen	50 Laporan
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun n)	90 Laporan	7200%	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	7200%	18 Laporan
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Kegiatan Bulanan dan Semester	90 Laporan	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	72 Laporan	18 Laporan
7	01	01	2	02	07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Prognosis dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80%	100%	93,50%	93,5%	100%	75%	19%
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penjaga Malam	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Aset secara Baik dan Benar	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80%	100%	100,00%	100,0%	100%	80%	20%
7	01	01	2	03	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kepegawaian secara Baik	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Diklat Tusi Pegawai	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	03	05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80%	100%	98,18%	98,18%	100%	78,54%	20%
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket

7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Penyediaan Bahan/Material	60 paket	48 paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 paket	12 Paket
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 laporan	12 Laporan
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 laporan	12 Laporan
7	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 laporan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 laporan	12 Laporan
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 laporan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 laporan	1 Laporan
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20%	100%	0,00%	0,0%	100%	20%	80%
7	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	50%	5 unit		0,0%	0,00%	0%	0,00%
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	50%	6 unit		0,0%	6 unit	0%	6 unit
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	35%	3 unit		0,0%	3 unit	0%	3 unit
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	50%	3 unit		0,0%	3 unit	0%	3 unit
7	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	50%	1 unit		0,0%	1 unit	0%	1 unit
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	50%	1 unit		0,0%	1 unit	0%	1 unit
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	50%	3 unit		0,0%	3 unit	0%	3 unit
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80%	100%	44,41%	80,0%	100%	80%	20%
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	70%	0%	100,00%	93,65%	93,65%	66%	20%
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	05	03	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,Keindahan) keindahan)	100%	80%	100%	89,80%	89,80%	100%	72%	18%
1	05	03	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	48 laporan	12 laporan
1	05	03	2	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 kasus	4 kasus	1 kasus	1 kasus	100%	1 kasus	4 kasus	1 kasus
1	05	03	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bervuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bervuasa Hak Asasi Manusia	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah laporan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas	100%	80%	100%	100,00%	100,0%	100%	80%	20%
1	05	03	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Perda dan Perkada	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen

1	05	03	2	02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
1	05	02				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Aduan kebakaran		0%						
1	05	03	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	80%	100%	99,88%	99,88%	100%	80%	20%
1	05	03	2	01	01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen
1	05	03	2	01	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	04	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	05	Penyerenggaran Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah laporan Penyerenggaran Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan
1	05	03	2	01	07	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	5 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	1 laporan

Penjelasan Tabel 2.2 kaitannya dengan perencanaan dalam Renja 2023, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 kegiatan yang direncanakan tetapi hanya 5 kegiatan yang dapat dilaksanakan, 3 kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mencapai target, belum mencapai target ataupun melebihi target dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar 94,63 %, dengan rincian :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 %
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 %

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 94,99%
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96,86%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 %
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
- Fasilitasi Kunjungan Tamu 100%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 86,05%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25%

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 93,65%

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terdapat 2 kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mencapai target, belum mencapai target ataupun melebihi target dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebesar 91,27% dengan rincian :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 99,97 %
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100%
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 64,71
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 99,97%

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan :

- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 98,23 %
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terdapat 1 kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mencapai target, belum mencapai target ataupun melebihi target dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Realisasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 99,88 % dengan rincian :
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 99,88 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

Analisis dan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk target maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh suatu instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Kemudian dilakukan pengukuran /penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Ende tahun 2019-2024. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat digambarkan pada tabel T.C.30. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja secara strategis dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Di tahun 2023, dari 5 atau Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja, menggunakan rumus pengukuran kinerja dengan cara membandingkan rencana dan realisasi, semua Indikator Kinerja tercapai (100%) dari pencapaian kinerjanya Renja dan 100% dari pencapaian kinerja Renstra.

Tabel.2.2 TC.30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	11	12	12	13
1	Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja			cc	b	b	b	b	b	Direncanakan minimal 4 Kegiatan setiap Tahunnya, dari total 5 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin
2	Persentase Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Direncanakan minimal 4 Kegiatan setiap Tahunnya, dari total 5 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin
3	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Direncanakan minimal 3 Kegiatan setiap Tahunnya dari 4 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin
4	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Direncanakan minimal 1 Kegiatan setiap Tahunnya dari 2 kegiatan yang ada dengan tetap memperhatikan beban kerja serta unsur pelayanan perlindungan masyarakat seoptimal mungkin
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit		15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	Direncanakan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai standar yang ditetapkan (15 menit)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Ende

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah:

Kinerja pelayanan SATPOL PP Kab.Ende pada tahun 2023 dapat terlihat dari 3 indikator yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan), Persentase Penegakan PERDA, dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Untuk Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) terdapat 8 kegiatan, yang dilaksanakan 2 Kegiatan yaitu kegiatan Penanganan Gangguan Ketertenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan, Sub Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan dan Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terdapat 1 kegiatan, yang dilaksanakan 1 Kegiatan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan Dan Hambatan yang dihadapi oleh OPD serta Solusi yang dilakukan :

Beberapa permasalahan yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat antara lain :

- a. Kurangnya komitmen dari segi anggaran bagi kebutuhan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kinerja yang belum bisa terukur dan sistematis menjawab target dari Renstra dan RPJMD Kabupaten Ende;

- b. Keterbatasan jumlah BANPOL SATPOL PP. Penambahan jumlah penduduk harus berbanding lurus dengan kemampuan aparaturnya SATPOL PP dan jumlah petugas lapangan. Hal tersebut memudahkan setiap gerak SATPOL PP dalam melakukan tindakan justisia Penegakan Perda, khususnya dalam melakukan pencegahan berbagai konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat demi menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat Kabupaten Ende

Upaya pemecahan masalah urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat yang dilakukan adalah:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi berbasis kinerja, dengan memberdayakan sumber daya manusia aparaturnya dalam keterbatasan anggaran, sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing dengan tetap mengutamakan prinsip gerak cepat dan tepat dalam menjamin keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Ende;
 - b. Melibatkan semua aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende untuk mengoptimalkan potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. Memberikan pemahaman kepada seluruh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bahwa substansi seluruh program dan kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap capaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende;
 - d. Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas kerja berbasis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
3. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yaitu “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” serta misi kelima yaitu “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat”. Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai dengan RENSTRA 2019-2024 dalam 5 (lima) indikator kinerja utamanya berupaya untuk terus mencapai hasil yang maksimal dalam kualitas dan kuantitas pelayanan pada sektor perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :

Tantangan (Threats) antara lain :

a. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional khusus yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang serumpun dengan penyidik dan atau detektif. Jumlah kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan memperhitungkan perbandingan jumlah personel dengan jumlah penduduk Kabupaten Ende dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum & ketentraman masyarakat, bidang peningkatan sumber daya aparatur serta bidang pemadam kebakaran. Disamping hal itu, untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, lebih mumpuni lagi bila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende memiliki banyak tenaga pegawai yang menguasai ITE (Informasi Teknologi Elektronik), hingga akhirnya akan lebih mudah mengakses informasi maupun data yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerjanya.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran Peraturan Daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat mempersiapkan personelnya lebih berkualitas dan berkuantitas, terutama dari pengerahan anggota yang sigap saat terjadi peristiwa insidentil seperti; huru-hara, bencana daerah (baik yang diakibatkan alam/human error/sosial dll), keadaan “chaos” karena pertikaian antar desa/kampung/dusun/geng motor yang timbulkan keresahan masyarakat, peningkatan pengamanan Kepala Daerah dan kerusuhan/kekacauan dalam bentuk lain sebagainya.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakkan mobilitas yang bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam.

Peluang (Opportunities) :

Ada peluang (opportunity) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas “sepak terjang” Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis website dan online yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program pembangunan daerah yang akan/sedang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende;
- b. Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah provinsi/pusat;
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantapan sistem keamanan lingkungan seperti: intensitas kegiatan siskamling,

- partisipasi yang membantu tugas-tugas anggota Linmas untuk keamanan lingkungan pada semua unsur kewilayahan;
- d. Pemerintah Prop/ Kab/ Kota dan Pihak ketiga baik yang berasal dari kementerian/non kementerian, badan hukum, yayasan, yang menawarkan kerjasama dalam rangka pemantapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende di masa - masa mendatang;
 - e. Bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Ende terhadap Peraturan Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - f. Lahirnya produk hukum pemerintah daerah/pusat yang memperluas cakupan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dimasa-masa mendatang, sehingga berdampak pada perluasan kewenangan tugas maupun fungsinya.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan :
- Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Ende nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Ende Ende Nomor 35 Tahun 2016 tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende adalah membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah bidang Ketenteraman dan Ketertiban. Adapun beberapa rekomendasi dan catatan sebagai berikut:
- 1. Ketersediaan Anggaran yang terbatas bagi peningkatan kualitas SDM, Sumber daya sarana dan prasarana operasional bagi kepentingan pelayanan publik;
 - 2. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3. Keterlibatan masyarakat terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 4. Mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanis dan persuasif;
 - 5. Tuntutan peningkatan kesiagaan bencana bahaya kebakaran dan rehabilitasi pasca bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan analisis kebutuhan yang mendasar, dalam dua tahun usulan-usulan yang ditargetkan perencanaannya melalui Rencana Kerja OPD dengan kegiatan-kegiatan dan program yng terukur, sistematis, dan terkoneksi dengan Renstra, terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende, namun hal ini berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak seperti : perencanaan politis, teknokratis, kebutuhan situasional serta minimnya anggaran. Dengan situasi tersebut Perangkat Daerah SATPOL PP mengikuti pelaksanaan anggaran yang sudah melalui mekanisme penetapan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada prinsipnya kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan. Konsep awal anggaran berbasis kinerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal bahkan target kinerja SATPOL PP Kab.Ende tidak dapat terealisasi secara maksimal dengan begitu minimnya alokasi anggaran.

Dokumen perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja SATPOL PP Kabupaten Ende Tahun 2025, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menyesuaikan dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025. Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dapat dilihat pada **Tabel 2.4 . TC.31** pada pemaparan dibawah ini :

Tabel 2.4 TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi NTT/Kabupaten Ende

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun anggaran	100%	4.433.291.399	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun anggaran	100%	4.433.291.399	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	54.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	54.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1.500.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	25.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.000.000	
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.500.000	
9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Satpol PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.000.000	
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 dokumen	1.000.000	
12	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Satpol PP	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.222.791.399	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.222.791.399	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	3.181.791.399	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	3.181.791.399	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	3.000.000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.000.000	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Satpol PP	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	2.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	2.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	1.000.000	
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	76.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	76.000.000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Satpol PP	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Satpol PP	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	
5	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Satpol PP	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1.000.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Satpol PP	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1.000.000	
6	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1.000.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1.000.000	
7	Pemindahan Tugas ASN	Satpol PP	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 Orang	1.000.000	Pemindahan Tugas ASN	Satpol PP	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 Orang	1.000.000	

8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	58.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	58.000.000	
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1.000.000	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	350.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	350.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000	
6	Penyediaan Bahan/Material	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	49.990.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	49.990.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	100.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Indeks Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	100%	355.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	100%	355.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	210.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	210.000.000	
2	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	35.000.000,00	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	35.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	60.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	315.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	315.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	175.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	175.000.000	
2	Pemeliharaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	25.000.000	

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000	
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
II	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	0	100%	1.350.000.000	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	100%	1.350.000.000	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Persentase Penurunan Kasus K 3	100%	450.000.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu (1) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penurunan Kasus K 3	100%	450.000.000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	25.000.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	25.000.000	
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	50.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	50.000.000	
4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	25.000.000	
5	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	25.000.000	
6	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 Orang	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 Orang	25.000.000	
7	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Satpol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Satpol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
8	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Satpol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	10 Orang	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Satpol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	10 Orang	25.000.000	
9	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	10 Orang	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	10 Orang	25.000.000	
10	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	75.000.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	75.000.000	

11	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	25.000.000,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	25.000.000	
12	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terdampak Perda dan Perkada yang Penegakan Terlayani	12 Laporan	25.000.000,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terdampak Perda dan Perkada yang Penegakan Terlayani	12 Laporan	25.000.000	
13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	50.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	50.000.000	
14	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen	25.000.000,00	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen	25.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase PERDA / PERKADA diteteggakkan	100%	700.000.000			Terlaksananya Penegakan Perda	100%	700.000.000	
1	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	12 unit	100.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	12 unit	100.000.000	
3	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	50.000.000,00	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	50.000.000	
4	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	6 laporan	75.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	6 laporan	75.000.000	
5	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	75.000.000,00	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	75.000.000	
6	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	75.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	75.000.000	
7	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	200.000.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	200.000.000	
8	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	75.000.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	75.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Satpol PP	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat PPNS	100%	200.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat PPNS	100%	200.000.000	
1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	25.000.000,00	Pembentukan Sekretariat PPNS	Satpol PP	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	25.000.000	
2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	25.000.000	
4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	25.000.000,00	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	25.000.000	
5	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perda	2 Laporan	75.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perda	2 Laporan	75.000.000	

III	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	100%	508.600.000	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		0	100%	508.600.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	263.600.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	263.600.000
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	25.000.000,00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	25.000.000
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	83.600.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	83.600.000
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	20.000.000
4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000
5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	25.000.000,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	25.000.000
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Satpol PP	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	4 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Satpol PP	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	4 Desa/Kelurahan	10.000.000
7	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Satpol PP	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Satpol PP	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	10.000.000
8	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Satpol PP	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	1 laporan	10.000.000,00	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Satpol PP	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	1 laporan	10.000.000
9	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Satpol PP	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Satpol PP	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	10.000.000
10	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Satpol PP	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Satpol PP	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	1 Dokumen	10.000.000
11	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000

12	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	50 Keluarga	30.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	50 Keluarga	30.000.000
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	15.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	15.000.000
1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000,00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000
2.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelalkan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000,00	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelalkan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Satpol PP	Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	30.000.000	Investigasi Kejadian Kebakaran		Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	30.000.000
1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	30.000.000,00	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	30.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satpol PP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	50.000.000
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	30.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	30.000.000
2.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	20.000.000,00	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	20.000.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Satpol PP	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	150.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	150.000.000
1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	5 Laporan	20.000.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	5 Laporan	20.000.000
2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	5.000.000,00	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	5.000.000
3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	50.000.000,00	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	50.000.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	75.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				
	TOTAL				6.291.891.399					6.291.891.399

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun beberapa usulan yang diperoleh melalui beberapa metode perencanaan untuk mengakomodir berbagai kepentingan serta menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, meliputi perencanaan bottom up (Musrenbang), melalui intervensi kepentingan politik (aspirasi masyarakat lewat pokok pikiran DPRD) juga melalui pemetaan secara teknis berdasarkan kebutuhan secara kabupaten. Usulan-usulan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan mencerminkan keterwakilan dan sesuai dengan konteks serta sejalan dengan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, namun setelah ditelaah secara cermat usulan dimaksud secara teknis perlu direvisi baik secara anggaran juga kelayakan usulannya. Usulan kegiatan masyarakat Desa dan Kelurahan yang diperoleh saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENGBANG) Kecamatan dan yang selanjutnya difinalisasikan pada tingkat MUSRENGBANG Kabupaten, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5 TC.32 berikut ini :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023 PROVINSI NTT/KABUPATEN/KOTA (Tabel 2.5.TC.32)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE

No	Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban						
		Desa Tina Bani	Ende	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	15 orang	25.000.000	
		Desa Mbombengga	Nangapanda	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	5 orang	15.000.000	
		Kelurahan Paupire	Ende Tengah	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	1.Paket	8.000.000	
		Desa Je'o D'ua	Detukeli	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	6 orang	15.000.000	
		Desa Waturaka	Kelimutu	Terlaksananya Pelatihan Bagi Anggota Linmas	1 Paket	15.000.000	
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu : “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” ,dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdaya saing dalam lingkup Perlindungan Masyarakat mengandung arti: “Memiliki kemampuan mengayomi serta memberikan perlindungan secara optimal yang dihasilkan melalui pola pengawasan, penindakan serta pembinaan, secara terukur, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan Stanndart Operasional dan Standart Pelayanan Mayarakat yang terpadu dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan sisi humanis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 adalah Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Visi ini dijabarkan melalui 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi seluruh Masyarakat
3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan
4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

- Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

Sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende mendukung pencapaian misi ke lima yaitu “Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat.

Guna mencapai visi dan misi Pembangunan Daerah maka OPD membuat Renstra OPD untuk menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	1. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah;	1. Persentase Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani
	2. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	2. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 3. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selain berpedoman pada RPJMD 2019– 2024, faktor yang juga menjadi bahan pertimbangan antara lain pencapaian Visi Misi Bupati Ende. Berikut strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang tertuang dalam Renstra tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	1. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah	1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 2. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam upaya mengatasi masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat.	1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Peningkatan pemantauan, penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah 3. Peningkatan kesiagaan Aparatur dalam mengamankan wilayah dari tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini
	2. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar		1. Peningkatan kesiagaan penanganan bencana kebakaran

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. Faktor internal

Pada faktor internal ini SATPOL PP Kabupaten Ende telah merumuskan berbagai program dan kegiatan berdasarkan pemetaan secara internal dengan melihat program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan juga perubahan atas Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selain berdasarkan regulasi yang ada hal yang

paling mendasar disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pemetaan potensi rawan konflik di Kabupaten Ende.

b. Faktor eksternal

SATPOL PP Kabupaten Ende wajib meterjemahkan visi misi Bupati Ende periode 2019-2024 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende. Faktor eksternal inilah yang memicu SATPOL PP Kabupaten Ende mendesain kegiatan, program yang dapat menjawab apa yang dicita-citakan selama lima tahun.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Secara garis besar meliputi program-program yang dibuat melalui terjemahan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut; Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang kami paparkan sudah terkoneksi dengan perubahan sinkronisasi PERMENDAGRI nomor 90 tahun 2019. Dan terkoneksi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Adapun beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan dari awal dan sudah terekam dalam RKPD pada akhirnya juga disesuaikan kembali berdasarkan prioritas serta kondisi anggaran Kabupaten Ende.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan **Tabel 3.3. T-C.33.** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten Ende Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende seperti pada pemaparan dalam tabel di bawah ini:

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. ENDE
TAHUN 2025**

[illegible]

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	3 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	1500000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan			6 Laporan	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	6 Laporan	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan			6 Laporan	3.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	6 Laporan	3000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 1.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan WalidataPendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	1500000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah															
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang TelahDikumpulkan dan DiperiksaLingkup Perangkat Daerah	3 Data			1 Laporan	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Laporan	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 1.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam RangkaPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Berita Acara			1 Berita Acara	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Berita Acara	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD															
			Jumlah DokumenPerencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen			2 dokumen	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 1.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis															
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3 Berita Acara			1 Berita Acara	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Berita Acara	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%			-	3.222.791.399			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	3222791399	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang/bulan			110	3.181.791.399	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	120 Orang/bulan	3181791399	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	20000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Jumlah Dokumen Penateusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	2 Dokumen	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	5000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36 Laporan			12 Laporan	3.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi	12 Laporan	3000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi	1 Dokumen	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	2000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%			-	10.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi	1 Dokumen	2000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 3.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	36 Laporan			12 Laporan	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Laporan	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan			12 Laporan	2.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	2000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan			12 Laporan	2.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	2000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 3.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			-	76.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	76000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit			1 Unit	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Unit	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			1 Paket	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Paket	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang			1 Orang	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Orang	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Laporan	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0008	Pemindahan Tugas ASN														
		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang			1 Orang	1.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Orang	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			10 Orang	58.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	10 Orang	58000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			10 Orang	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	10 Orang	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			10 Orang	1.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	10 Orang	1000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			-	350.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	350000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Paket	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Paket	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Paket	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	50.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Paket	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	10000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material														
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket			10 Paket	49.990.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	10 Paket	49990000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi	36 Laporan			12 Laporan	100.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	100000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	75.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	100%			-	355.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	355000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit			6 Unit	210.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	6 Unit	210000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			3 Unit	35.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	3 Unit	35000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			5 Unit	60.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	5 Unit	60000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Unit	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit			5 Unit	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	5 Unit	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100□%			-	60.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100□%	60000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	15.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	15000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	20.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	20000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100□%				-	315.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100□%	315000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit				10 Unit	175.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	10 Unit	175000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel															
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit				15 Unit	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	15 Unit	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit				5 Unit	15.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	5 Unit	15000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 9.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit				1 Unit	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Unit	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit				1 Unit	50.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Unit	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit				1 Unit	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Unit	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2 1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-				-	1.350.000.000						-	1350000000	
1.05.02.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100□%				-	450.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100□%	450000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
1	# #	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	# #	15	# #	# #

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0004			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0005			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang			30 Orang	50.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	30 Orang	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0006			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0008			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat													
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0010			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional													
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	30 Orang			10 Orang	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	10 Orang	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0011			Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP													
			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0012			Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan													
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	10 Orang			10 Orang	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	5 Orang	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0014			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas													
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	20 Orang			10 Orang	25.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	5 Orang	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	36 laporan			12 Laporan	75.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 laporan	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan			12 Laporan	25.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniLah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terdampak Perda dan Perkada yang Penegakan Terlayani	36 Laporan			12 Laporan	25.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 1.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	60 Unit			10 Unit	50.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	20 Unit	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 1.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota																
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-		100: %			-	700.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100: %	700000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 2.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 dokumen			1 dokumen	50.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 dokumen	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 2.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	30 unit			12 unit	100.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 dokumen	100000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.0 2.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																

			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 Laporan			12 Laporan	50.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah															
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	36 laporan			6 laporan	75.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 laporan	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah															
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	3 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 Laporan			12 Laporan	75.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	36 Laporan	36 Laporan		12 Laporan	200.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	200000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah	36 Laporan			6 Laporan	75.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			100%				200.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	200000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 3.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS															
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 3.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.0 3.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Laporan			1 Laporan	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	2 Laporan	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 3.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	36 Laporan			12 Laporan	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 3.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perda	6 Laporan			2 Laporan	75.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	2 Laporan	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			-			508.600.000						-	508600000	
	1.05.04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			100□%			263.600.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100□%	263600000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 Laporan			12 Laporan	83.600.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	12 Laporan	83600000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan bakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	20000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 1.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian BahanBerbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	20000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.04.2.0 1.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	30 Orang			10 Orang	25.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	10 Orang	25000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 1.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	12 Desa/Kelurahan			4 Desa/Kelurahan	10.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	4 Desa/Kelurahan	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 1.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran														
		Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	3 laporan			1 laporan	10.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 laporan	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 1.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 1.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran														
		Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 1.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 1.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	150 Keluarga			50 Keluarga	30.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	50 Keluarga	30000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.04.2.0 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	100%					15.000.000		Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	15000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 2.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	5000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 2.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	10000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 3	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	100%				30.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	30000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 3.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	3 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	30000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	100%				50.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 4.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang			50 Orang	30.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	20 Orang	30000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 4.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	20000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	100%				150.000.000			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	100%	150000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 5.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														

			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	3 Laporan			5 Laporan	20.000.000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Laporan	20000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 5.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi															
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Dokumen	5000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 5.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	1 Laporan	50000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.0 5.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi															
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	15 Unit			10 Unit	75.000.000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Reformasi birokrasi Program Stabilisasi Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende	5 Unit	75000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			J U M L A H					6.301.891.399							6.301.891.399	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dipaparkan rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah yang merupakan rumusan dan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2025. Gambaran yang terdapat dalam tabel T.C.33. rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat kami deskripsikan sebagai berikut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada tahun 2025 mendapat alokasi Pagu Indikatif sementara sejumlah Rp. 6.301.891.399,- (Enam Miliar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum. Sedangkan untuk perencanaan yang bersifat politik yaitu Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan Rencana Kerja ini dibuat masih dilakukan verifikasi oleh OPD teknis dan akan dituangkan secara resmi dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pagu indikatif sementara tersebut direncanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari : 1 (satu) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 3 (tiga) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan 5 (lima) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan.

Rincian program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 4.443.291.399,-)
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rp. 54.500.000,-)
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Rp 3.222.791.399,-)
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Rp 76.000.000,-)
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Rp 350.000.000,-)

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp.355.000.000,-)
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Rp.10.000.000,-)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Rp.60.000.000)
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Rp.315.000.000,-)
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Rp.2.077.400.000,-)
- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Rp.450.000.000,-)
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Rp.700.000.000,-)
 - Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota (Rp.200.000.000,-)
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Rp. 508.600.000,-)
- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 263.600.000,-)
 - Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (Rp. 15.000.000,-)
 - Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran (Rp. 30.000.000,-)
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (Rp. 50.000.000,-)
 - Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia (Rp. 150.000.000,-)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024. Program dan kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2024 ini diharapkan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dengan tetap mengedepankan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat dan masyarakat.

Dalam penjabarannya diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen bersama untuk menetapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Renja, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
2. Rencana kerja selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati Ende;
4. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi menyeluruh dengan mengintegrasikan capaian pelaksanaan program/kegiatan dengan target capaian RENSTRA untuk dijadikan bahan bagi penyusunan rencana kerja periode perencanaan berikutnya.
5. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Akhirnya, dengan memohon Rahmat dan Penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2024 ini, dengan harapan agar pembangunan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ende akan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

Pj. BUPATI ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU

